PEMBERITAAN KASUS KORUPSI E-KTP DI MAJALAH TEMPO DAN GATRA

(Analisis *Framing* Robert M. Entman Mengenai Kasus Korupsi E-KTP di Majalah Tempo Edisi 13-19 Maret 2017 dan Gatra Edisi 16-22 Maret 2017)

Wildan Bean Nugraha

Email: wildanbeannugraha@gmail.com

This study is designed to know case of e-KTP corruption on Tempo ad Gatra Journals. To do so, we proposed question about how to define problems, estimate causes of problems, make moral decisions, and solve problems on this news. This study was conducted by using qualitative approach with research design of Robert M. Entman framing analysis. The techniques of data collection used are documentation, in-depth interviews, literature studies, and online data investigation.The results of the study showed that in identifying problems, the Tempo see those problems as political and social, while Gatra see the problems as political and legal.In estimating the causes of problems, the Tempo considers politic actors, while Gatra consider actors and politic parties. In providing moral decision, the Tempo describes actors and politic parties involved in the corruption will not recognize their names, despite included in the prejudgment document. While Gatra describe all of politic parties will not recognize that they receive money from e-KTP project. Tempo emphasize the settlement of problems on the return of money and the acknowledgment of fault, while Gatra write the case down in terms of enforcement of the law by examining explicitly the case of e-KTP project. This study concluded that in framing news, the Tempo just tell some facts on the court session and stories of the e-KTP project, while Gatra has a lot of information on the report. There are some elementary concepts of journalism and journalistic code of ethics applied to Tempo and Gatra reports. The researcher suggests the two media should be more able to apply elementary concepts of journalism and journalistic code of ethics to the reports, so people have the whole information.

Keywords: *Corruption*, E-KTP, Robert M. Entman *Framing Analysis*, *Constructivisme*, *Magazine* Tempo, *Magazine* Gatra

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui kasus korupsi e-KTP di Majalah Tempo dan Majalah Gatra. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dimunculkan pertanyaan tentang bagaimana pendefinisian masalah, memperkirakan penyebab masalah, membuat keputusan moral, dan menyelesaikan masalah pada berita ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian analisis *framing* Robert M.Entman. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan dokumentasi, wawancara mendalam, studi kepustakaan dan penelusuran data *online*. Hasil penelitian ini menunjukan dalam mengidentifikasi masalah, Tempo melihat sebagai masalah politik dan sosial, sedangkan Gatra sebagai masalah politik dan hukum. Dalam memperkirakan penyebab masalah Tempo menilai aktor-aktor politik, sedangkan Gatra menilai dari aktor dan partai politiknya. Dalam memberikan keputusan moral, Tempo menggambarkan aktor dan partai politik yang terlibat korupsi tidak mau mengakui namanya meskipun telah ada di surat dakwaan. Sedangkan Gatra masih menggambarkan semua partai politik yang disebutkan tidak mau mengakui menerima uang dari proyek e-KTP. Tempo menekankan penyelesaian pada pengembalian uang dan mengakui kesalahannya, sedangkan Gatra menuliskan dari sisi penegakkan hukum untuk secara tegas mengusut kasus proyek e-KTP. Peneliti menyimpulkan dalam membingkai berita, Tempo hanya menceritakan beberapa fakta-fakta tentang persidangan dan mengisahkannya, sedangkan Gatra memiliki banyak informan dari beritanya. Ada beberapa konsep elemen jurnalisme dan kode etik jurnalistik yang diterapkan di dalam pemberitaan Tempo dan Gatra. Peneliti menyarankan agar kedua media lebih mampu menerapkan konsep elemen jurnalisme dan kode etik jurnalistik ke dalam pemberitaan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang utuh.

Kata Kunci: Korupsi, E-KTP, Analisis *Framing* Robert M.Entman, Konstruktivisme, MBM Tempo, MBM Gatra

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemberitaan tentang kasus korupsi e-KTP sedang memanas Maret 2017 ini. Seperti yang kita ketahui, kasus korupsi e-KTP ini merupakan kasus korupsi yang melibatkan banyak nama. Media massa cetak dan elektronik berburu untuk menyajikan kasus korupsi e-KTP. Banyak hal yang cukup menarik dari kasus korupsi e-KTP tersebut. Sehingga, masyarakat mengikuti rangkaian kasus korupsi ini dengan sumber informasi yang ada. Kasus korupsi e-KTP sebenarnya sudah lama mencuat namun kasus tersebut tidak kunjung terselesaikan.

Kasus mega proyek ini sebenarnya ada empat elemen yang bersangkutan, yaitu antara lain peran negara, DPR komisi 2, Kemendagri, dan Konsorium. Maka peran yang terlibat dalam skandal ini antara lain ketika dana turun ke DPR lalu diteruskan ke Konsorium dengan dana yang tidak utuh, artinya bahwa ketika dana proyek turun ke DPR lalu dari DPR nantinya ada pasang tender sebenarnya dana proyek tersebut sudah dibagi-bagikan ke kantong para pejabat korup tersebut. Dari tender juga menjadi masalah, karena ada terindikasi kecurangan.

Hal yang menarik dari kasus e-KTP adalah bermuaranya uang ratusan milyar ke partai politik. Ada 3 partai politik yang disebut dalam surat dakwaan kasus e-KTP, yaitu partai Golkar, partai Demokrat dan PDI-Perjuangan. Tak sedikit kalangan dari organisasi non-pemerintah yang membuka wacana untuk mengamputasi partai-partai politik yang korup. Tetapi, meskipun hal ini terbukti, maka ketua parrtai politik yang dijatuhi hukuman, sedangkan partai politiknya sendiri tidak serta merta dibubarkan.

Sekitar 60 anggota dewan disebut terkait dengan proyek megakorupsi ini. Termasuk ketua DPR, Setya Novanto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Setya Novanto sendiri disinyalir menjadi otak proyek e-KTP ini. Novanto mengajak Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin untuk membahas e-KTP. Novanto juga mengatur masuknya nama penguasaha lain seperti Paulus

Tano dan Andi Narogong yang merupakan kaki tangan Setya Novanto. Untuk memperlancar proses di awal, Novanto juga memberikan dana yang digunakan untuk bagi-bagi uang ke anggota dewan.

Banyaknya jumlah penanganan kasus korupsi di Indonesia pertahunnya menunjukkan besarnya perhatian yang harus dicurahkan penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan maupun lembaga pemerintah lainnya untuk berkomitmen kuat dalam menekan tindak korupsi. Banyak kasus korupsi silih berganti terkuak, mulai dari level bawah hingga para elit politik. Bukan hanya sekadar oknum, korupsi jadi bukti nyata dari kebobrokan birokrasi Indonesia. Sikap kritis masyarakat pada kasus korupsi seakan tidak mendapatkan dukungan penuh aparatur negara ketika banyaknya kasus korupsi yang terselesaikan dengan antiklimaks.

Berbagai media massa baik cetak maupun elektronik terus menyoroti konflik ini selama beberapa hari. Bahkan, tidak sedikit media yang menjadikan konflik ini sebagai sajian utama. Namun, dari sekian banyak media massa yang menjadikan kasus korupsi e-KTP tersebut sebagai laporan utama, hanya ada dua Majalah Berita Mingguan yang dalam rentang waktu hampir bersamaan menjadikan konflik ini sebagai laporan utama mereka, yaitu Majalah Tempo dan Gatra.

Tujuan peneliti mengambil pemeberitaan di Majalah Tempo dan Gatra sebagai Majalah Berita Mingguan untuk dijadikan objek penelitian karena Majalah Tempo dan Majalah Gatra tentu tidak mau ketinggalan dalam menyajikan kasus korupsi e-KTP. Tempo menerbitkan "Pesta Pora E-KTP" pada tanggal 13-19 Maret 2017 sedangkan Gatra menerbitkan "Bubarkan Partai Korup" pada tanggal 16-22 Maret 2017.

Konsep pembingkaian digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Pembingkaian dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu

mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu lain. (Eriyanto, 2002:186).

Entmanmelihat pembingkaian dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Penonjolan dari sebuah aspek akan membuat informasi lebih bermakna, menarik, berarti, atau diingat oleh khalayak. Penentuan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana berita tersebut akan ditentukan cara pandang yang digunakan wartawan dan media massa dalam menangkap realitas hingga proses penulisan berita.

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah makro menjadi "Bagaimana Pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di Majalah Tempo Edisi 13-19 Maret 2017 dan Gatra Edisi 16-22 Maret 2017?"

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah makro, maka peneliti merumuskan masalah mikro menjadi Bagaimana *Define Problems* (Pendefinisian Masalah), *Diagnose Causes* (Memperkirakan Masalah), *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral), *Treatment Recomendation* (Menekankan Penyelesaian) Pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di Majalah Tempo Edisi 13-19 Maret 2017 dan Gatra Edisi 16-22 Maret 2017?

1.3 Maksud Penelitan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui "Untuk Mengetahui Pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di Majalah Tempo Edisi 13-19 Maret 2017 dan Gatra Edisi 16-22 Maret 2017.

1.4 Tujuan Penelitan

Adapun tujuan penelitian pembingkaian berita untuk mengetahui *Define Problems* (Pendefinisian Masalah), *Diagnose Causes* (Memperkirakan Masalah), *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral), *Treatment Recomendation* (Menekankan Penyelesaian) Pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di Majalah Tempo Edisi 13-19 Maret 2017 dan Gatra Edisi 16-22 Maret 2017

1.4 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna sebagai bahan

kajian lebih lanjut tentang Ilmu Komunikasi secara umum, terutama dalam kajian komunikasi massa dan secara khusus memberikan sumbangsih dalam bidang Jurnalistik sebagai kajian tentang analisis teks media cetak dengan menggunakan model Robert M. Entman.

a. Penelitian ini merupakan salah satu bentuk aplikasi dari ilmu komunikasikonsentrasi jurnalistik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bekal pengetahuan dan menambah wawasan bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya untuk terus disempurnakan, sehingga dapat berfungsi seoptimal mungkin untuk melihat praktik jurnalisme.
c. Diharapkan dapat menjadi sumbangan dan referensi yang dapat menjadi masukan bagi Majalah Tempo dan Gatra dalam menyampaikan informasi kepada khalayak sehingga pemberitaan yang muncul di kemudian hari lebih objektif dan informatif.

2. Kajian Pustaka

2.1 Komunikasi

Komunikasi adalah topik yang amat sering diperbincangkan di berbagai kalangan, sehingga kata komunikasi itu sendiri memiliki terlalu banyak arti yang berlainan. Kata komunikasi atau *communication* dalam bahasa inggris berasal dari bahasa Latin *communis* yang berarti sama, *communico*, *communicatio*, atau *communicare* yang berarti "membuat sama" (*to make common*). Istilah pertama (*communis*) paling sering disebut sebagai asal kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, makna atau pesan dianut secara sama. (Deddy Mulyana, 2007: 45-46).

2.2 Komunikasi Massa

Definisi Komunikasi massa menurut Bittner seperti dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat *"mass communication is messages communicated through a mass medium to a large number of people"* (komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar

orang). Dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa adalah salah satu bentuk penyampian pesan dengan menggunakan media. Komunikator hanya menyampaikan pesan tanpa melalui siap dan golongan mana pesan tersebut diterima dan ada kalanya proses komunikasi terjadi dengan menggunakan media. (Rakhmat, 2015:3)

2.3 Media Massa

Elvinaro mengatakan, media massa pada dasarnya dapat menjadi dua kategori, yakni media massa cetak dan media elektronik. Media cetak yang dapat memenuhi kriteria sebagai media massa adalah surat kabar dan majalah, sedangkan media massa elektronik meliputi televisi, radio siaran film dan media *on-line*. (Ardianto, 2015:103).

2.4 Majalah

Majalah sebagai kumpulan berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya, yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran kuarto atau folio dan dijilid dalam bentuk buku, serta diterbitkan secara berkala. Perbedaan majalah dan koran terletak pada penerbitannya. Koran penerbitan berkalanya adalah setiap hari, maka dalam majalah penerbitannya bias seminggu sekali, sebulan sekali, atau tiga bulan sekali.

2.5 Berita

William S. Maulsby. Dalam *Getting the News* ia menegaskan, berita bisa didefinisikan sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian para pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut. (Sumadiria, 2005:64).

2.6 Unsur Berita

Dalam membuat sebuah berita yang baik terdapat unsur-unsur sebuah berita, dimana unsur berita tersebut adalah sebuah rumus dasar dalam setiap pembuatan sebuah nilai berita. Unsur yang perlu diperhatikan adalah *what* (apa), *who* (siapa), *where* (dimana), *when* (kapan), *why* (mengapa), dan *how* (bagaimana).

2.7 *Feature*

Menurut Mappatoto (1999) dalam buku Haris Sumadiria yang berjudul "Jurnalistik Indonesia" menyebutkan bahwa:

> *"Feature news* adalah artikel yang kreatif, kadang-kadang

subjektif, yang dirancang terutama untuk menghibur dan memberitahu pembaca tentang peristiwa, situasi, atau aspek kehidupan." (Sumadiria, 2005:152).

2.8 E-KTP

E-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK).

2.9 Korupsi

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi menurut buku yang menjadi reverensi bagi penulis pengertian korupsi sendiri yang juga dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), Korupsi didefinisikan sebagai:

"Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain."

2.10 Konglomerasi Media

Konglomerasi Media adalah penggabungan-penggabungan perusahaan media menjadi perusahaan yang lebih besar yang membawahi banyak media. Konglomerasi ini dilakukan dengan melakukan korporasi dengan perusahaan media lain yang dianggap mempunyai visi yang sama. Pembentukan konglomerasi ini dengan cara kepemilikan saham, *joint venture*/*merger*, atau pendirian kartel komunikasi dalam skala besar baik integrasi vertikal, integrasi horisontal maupun kepentingan silang.

2.11 Pers

Pers atau *press* digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita. Pers dan jurnalistik dapat diibaratkan sebagai jiwa dan raga. Pers berasal dari perkataan Belanda pers yang artinya menekan atau mengepres. Kata pers

merupakan padanan dari kata *press* dalam bahasa Inggris yang juga berarti menekan atau mengepres. Secara harfiah kata pers atau *press* mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Pers adalah aspek raga, karena ia berwujud, konkret dan nyata, sedangkan jurnalistik adalah aspek jiwa, karena ia abstrak, merupakan kegiatan, dan menghidupi aspek pers.

2.12 Konsep *Framing*

Framing memberikan tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan atau dianggap penting oleh pembuat teks. Kata penonjolan itu sendiri dapat didefinisikan membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diinget khalayak. Informasi yang menonjol lebih diterima oleh khalayak.

2.13 Konstruksi Realitas Media Massa

Teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Luckman telah direvisi dengan melihat variabel atau fenomena media massa menjadi sangat substansi dalam proses eksternalisasi, subyektivasi, dan internalisasi inilah yang kemudian dikenal sebagai "konstruksi sosial media massa". Substansi dari konstruksi sosial media massa ini adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya merata. Ada 3 tahap:

1 Tahap Menyiapkan Media Konstruksi
2 Tahap Sebaran Konstruksi
3 Tahap pembentukan konstruksi realitas
4 Tahap Konfirmasi

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain analisis *framing* Robert M. Entman.

3.2 Analisis *Framing* Model Robert M. Entman

Robert M. Entman dalam Eriyanto adalah seorang ahli yang meletakan dasar-dasar bagi analisis *framing* untuk studi isi media melihat *framing* dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau

penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak.

Dalam konsep Entman, *framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berfikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Entman menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Sehingga *framing* dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari pada isu yang lain.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dipahami sebagai langkah-langkah maupun cara yang ditempuh oleh peneliti guna mendapatkan data-data dari beragam sumber untuk keperluan penelitian yang tengah dikaji yang dalam penelitian ini adalah beragam sumber data terkait pada cara suatu media membingkai berita Kasus Korupsi e-KTP.

a. Studi Pustaka

   Studi pustaka yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data yang berasal dari literature seperti buku, dan berita di berbagai media yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta informasi lain mengenai pemberitaan isu kasus korupsi e-KTP.

b. Studi lapangan yang berupa wawancara, dokumentasi dan *internet searching*.

3.4 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan beberapa langkah pengujian data yang dilakukan peneliti dalam penelitian kualitatif. Dalam uji keabsahan data, peneliti menggunakan uji credibility (validitas internal) atau uji kepercayaam terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan.

a) **Perpanjangan Pengamatan**

Dalam langkah uji keabsahan data ini, peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan serta mewawancarai kembali narasumber yang sebelumnya telah ditemui ataupun mencari narasumber baru guna mendapatkan data-data terbaru yang maksimal untuk penelitian yang dilakukan.

b) **Peningkatan Ketekunan**

Dalam hal peningkatan ketekunan ini, peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c) **Diskusi Dengan Teman Sejawat**

Langkah ini dilakukan dengan mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Pemeriksaan sejawat berarti pemerikasaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat me-*review* persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan. (Moleong, 2007:334).

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data juga merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian secara sistematik tentang suatu hal sebagai upaya untuk mengetahui bagian-bagian, hubungan diantara bagian, dan hubungan bagian dengan keseluruhan.

1. Reduksi data. Peneliti mencoba untuk mengumpulkan informasi informasi penting terkait masalah penelitian, lalu mengelompokan data tersebut sesuai dengan topik masalah.
2. Menyajikan data. Data yang telah terkumpul kemudian disajikan secara sistematis sehingga peneliti dapat menelaah dan mengamati komponen-komponen masalah.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini peneliti menarik sebuah kesimpulan berdasarkan masalah yang diteliti.

3.6 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kota Bandung, Jawa Barat.

3.7 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti selama kurang lebih 6 (enam) bulan terhitung mulai dari bulan Februari 2017 hingga bulan Juli 2017.

4. Pembahasan

4.1 Hasil Analisis Robert M. Entman dalam kasus e-KTP dalam Majalah Tempo

Tempo dan Gatra memberitakan tentang kasus yang sama, yaitu e-ktp. Tetapi, Tempo dan Gatra memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memandang kasus ini. Jika dipecah dalam analisis Robert. M. Entman Tempo melihat masalah e-ktp sebagai masalah politik dan sosial. Tempo menariknya dalam masalah politik dalam berita pertama dan kedua karena lebih investigasi kepada kasus korupsi oleh aktor politik dan komplotan politik. Sosial pada berita ketiga menceritakan kesulitan masyarakat. Aktor politik dalam artian perorangan. Seperti Setya Novanta, Anas Urbaningrum, Nazaruddin, Andi Narogong dll. Aktor politik yang seharusnya melayani masyarakat tetapi malah menyulitkan karena tidak mendapatkan e-KTP. Orang-orang yang terlibat korupsi segera mengakui dan mengembalikan uangnya.

4.2 Hasil Analisis Robert M. Entman dalam kasus e-KTP dalam Majalah Gatra

Gatra, menarik kasus e-ktp sebagai masalah politik dan hukum. Politik karena dilibatkan pada partai politik, tentang kerja sama para aktor politik setelah itu, Gatra menarik masalah pada sisi hukum. Mengenai UU yang diterapkan dalam kasus korupsi ini. Partai Politik seperti PDIP, Demokrat dan Golkar selain itu, aktor Politik Setya Novanta, Anas Urbaningrum, Nazaruddin, Andi Narogong dll. Partai dan pribadi tersebut perlu mempertangung jawabkan perbuatan mereka, dan menggambarkan betapa liciknya partai politik tersebut untuk melancarkan e-KTP ini. Menuntut KPK agar bekerja menyelasikan kasus korupsi e-KTP ini.KPK harus memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberantas korupsi.

4.3 Konglomerasi Media

Tempo mengklaim dirinya sebagai media yang netral, dan hanya ingin memberitakan untuk publik untuk diketahui alasan banyak. Tempo juga mengatakan telah mengetahui tentang kejangggalan e-KTP sejak dari 6 tahun lalu, bahkan sebelum KPK mengetahui kejanggalan tersebut.

Maka, akan menjadi kejanggalan jika Tempo tidak mencium adanya peran PDIP seperti yang diberitakan oleh Gatra. Memang, sebagai media Tempo berhak melakukan asas praduga tak bersalah, karena sebagai jurnalis, Tempo harus bisa melihat keterkaitan dari sebuah kasus dan perkara terhadap kondisi yang ada.

Jika, dilihat dari susunan redaksinya, memang anggota Tempo tidak ada hubungan dengan PDIP, dan tidak mengusut partai politik seperti apa yang telah diberitakan oleh Gatra. Hali ini, entah dikarenakan Tempo ingin mengarahkan kasus ini kepada perorangan dan ingin mengusut orang-satu persatu tanpa membawa partai, sehingga kasus ini cepat selesai dan para tersangka bisa langsung terteangkap. Seperti dalam berita pertama, Tempo mencurigai keterlibatan Setya Novanto dalam kasus ini, dan mengatakan bahwa Setya Novanto selalu lolos dalam setiap kasusnya. Mengingat kematian Johannes Marliem dikarenakan untuk mengetahui apakah Setya Novanto bersalah atau tidak.

Memang, Tempo lembaga independen dan tidak terlibat dengan politik apapun, tetapi, Tempo memang ingin menjerat salah satu aktor politik dan dari berita pertama dan kedua yang diterbitkan Tempo, Tempo memang memberikan penonjolan pada aktor tersebut.

Dalam bukunya (Ilyas, 2012) diungkapkan bahwa intervensi dalam media pasti terjadi. Intervensi itu bisa datang dari pemerintah, pemilik media, temannya pemilik media, teman sendiri, bahkan dari lingkungan tempat tinggal sebagai wartawan. Di mana pun Anda, intervensi itu ada. Sekarang adalah bagaimana seorang jurnalis melakukan tawar-menawar untuk itu. Jangan mimpilah media itu bisa streril dari intervensi (Ilyas, 2012).

Tempo dengan Goenawan Mohammad sendiri dahulunya

merupakan mantan anggota Partai Amanat Nasional. Terlepas dari kasus e-KTP, karena PAN tidak termasuk dalam surat dakwaan, seorang tokoh media, tidaklah dianjurkan masuk ke partai. Karena, pemberitaan dalam media tersebut akan tidak berimbang. Pasti ada intervensi pemilik untuk menonjolkan partai yang ia anggotakan.

Petinggi Gatra, tidak memiliki jejak politik sebelumnya. Bob Hasan yang sekarang menjadi narapidana pun tidak pernah ikut dalam partai politik. Mengingat bahwa media berkomitmen kepada masyarakat dan publik elemen jurnalistik ke dua. Independen terhadap sumber berita elemen jurnalistik ke empat, menjadi pemantauan kekuasaan elemen jurnalistik ke lima, dan mengutamakan hati nurani elemen jurnalistik ke sembilan.

Dalam komunikasi pasti ada pihak komunikator-media-pesan-komunikan. Dalam penlitian ini Tempo sebagai komunikator yang memberikan fakta tentang kasus e-KTP melalui komunikasi massa, media cetak majalah, dengan pesan-pesan dari seluruh investigasi yang telah dilakukan Tempo dan Gatra, dan masyarakat menjadi komunikannya. Tempo dan Gatra sebagai majalah berita mingguan memberikan topik ekonomi, bisnis dan politik untuk diketahui oleh khalayak Indonesia. Tempo dan Gatra juga memenuhi karakteristik majalah. Penyajian berita di Tempo dan Gatra lebih dalam, karena Tempo melakukan pencarian data selama seminggu lalu menerbitkannya. Nilai aktualitas berita Tempo dan Gatra pun bertahan lebih dari pada berita koran yang hanya berumur satu hari. Tempo dan Gatra juga memuat gambar berita yang cenderung lebih banyak dibanding dengan berita koran, oleh karena itu, penonjolan lebih mudah didapatkan dari majalah berita mingguan daripada berita biasa. Sampul Tempo dan Gatra pun di *design* dan sedemikian rupa menyesuaikan dengan tema pada saat itu. *Design* tersebut dibicarakan dengan matang agar dapat mewakili tema berita. Berita dalam Tempo dan Gatra cenderung bersifat *feature story* dan *investigasy reporting*.

Berita yang disampaikan mengalir seperti bercerita dan membuat pembaca hanyut dalam berita tersebut dan juga investigasi dimana berita yang disajikan pun mendalam. Tempo dan Gatra pun lengkap dalam pengaplikasian unsur 5W+1Hnya.

5. Simpulan

1. Tempo mendefinisikan kasus korupsi e-KTP ini sebagai masalah politik dan sosial yang berujung pada kesulitan masyarakat dalam mendapatkan e-KTP untuk berbagai aspek kehidupan. Sedangkan Gatra mendefinisikan kasus korupsi e-KTP ini sebagai masalah politik dan hukum yang berujung pada pembubaran partai partai politik.
2. Tempo lebih menuduh pada pribadi atau perseorangan seperti Setya Novanto, Anas Urbaningrum, Nazaruddin. Mereka melakukan tersebut karena keuntungan yang didapatkan. Sedangkan Gatra menunjuk pada pribadi yang ada dalam partai politik serta partai politiknya. Kasus e-KTP ini terjadi karena adanya keuntungan yang bisa di *markup* tetapi bisa berimbas pada pembubaran partai politik.
3. Keputusan moral yang dijelaskan Tempo adalah beberapa aktor politik yang tidak mau mengakui meskipun namanya telah ada di surat dakwaan dan ada beberapa aktor politik yang mau mengembalikan uang dari proyek e-KTP. Tempo memberikan moral bahwa banyak masyarakat yang dirugikan akibat ulah para aktor politik yang erlibat. Masyarakat sulit mendapatkan gajinya karena tidak memiliki KTP, dan tidak bisa mebuka rekening. Sedangkan Gatra semua disebut kan tidak mau mengakui menerima uang dari kasus proyek e-KTP. Pembubaran partai politik yang menjadi tanggung jawab moral partai terhadap masyarakat, karena partai politik adalah organisasi yang menjadi sarana pendidikan politik masyarakat.
4. Penyelesaian masalah Tempo segera mengembalikan uang dan mengakui kesalahannya. Sedangkan Gatra lebih ke penegak hukum seperti KPK dan ICW menuntut peran dari KPK

untuk secara tegas mengusut kasus ini.

5. Tempo dan Gatra memiliki sudut pandangnya sendiri terhadap kasus e-KTP ini. Tempo lebih bercerita pada fakta-fakta sehingga mengisahkan bagaimana kasus e-KTP bisa terjadi sedangkan Gatra memiliki banyak informan dari beberapa sudut pandang. Kedua majalah ini mengikuti beberapa elemen tetapi juga mengesampingkan beberapa elemen jurnalistik yang seharusnya tidak boleh diabaikan.

5.2 Saran

1. Majalah Tempo dan Gatra diharapkan selalu memperhatikan elemen-elemen jurnalisme, kode etik jurnalistik, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, khususnya mengenai akurasi berita dan asas praduga tak bersalah. Seperti dalam halnya pada berita pertama Tempo menuduh Setya Novanto dalam kasus korupsi seperti suap Akil, dan saham Freeport. Padahal Setya Novanto belum terbukti melakukannya. Tempo telah melanggar asas praduga tak bersalah. Gatra dalam hal ini juga menuduh partai politik yang katanya memakan uang e-KTP.
2. Majalah Tempo dan Gatra sebaiknya lebih disiplin dalam melakukan verifikasi. Tempo dan Gatra, pemakaian sumber anonym dan porsinya dalam pemberitaan sebaiknya tidak terlalu banyak. Sumber anonym sebenanarnya jika bisa tidak perlu digunakan. Karena, sulit untuk dipertanggung jawabkan. Jika memakai sumber anonym maka, media tersebut pun tidak melakukan verifikasi narasumbernya.
3. Majalah Tempo dan Gatra sebaiknya menyajikan berita secara proporsional. Dalam hal ini seharusnya Tempo menghadirkan semua partai politik dan menjelaskan siapa saja yang terlibat dari awal sampai akhir, karena banyak tokoh-tokoh yang tidak disebutkan oleh Tempo tapi, terungkap oleh Gatra.